



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 15 September 2016

Halaman: 10

DPRD Badung Bertamu ke Pemkot



KUNJUNGAN – 52 anggota DPRD Kabupaten Badung mengikuti diskusi dengan jajaran Pemkot Yogyakarta saat kunjungan kerja, Rabu (14/9) kemarin.

UMBULHARJO, BERNAS – Anggota DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali, Rabu (14/9) pagi, mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Rombongan berjumlah 52 orang itu dipimpin langsung Drs Putu Parwata Mk MM, selaku Ketua DPRD setempat.

Kunjungan ini selain dimaksudkan untuk silaturahmi juga dalam rangka diskusi terutama berkaitan dengan tentang Sistem Administrasi Perizinan, Kebersihan dan Pertamanan, Pendapatan dari Pajak dan Retribusi serta Masalah Pendidikan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi yaitu Komisi I, II, III dan IV.

Staf Ahli Walikota Bidang Administrasi Umum Drs Triwidiyanto, saat menerima tamu-tamunya di Ruang Rapat Arjuna Dinas perizinan Balaikota Yogyakarta mengatakan pihaknya senang dan menyambut baik

kunjungan DPRD Kabupaten Badung. Ia berharap agar seluruh kegiatan pada kunjungan ini tidak hanya memberikan wawasan tetapi juga akan meninggalkan kesan yang positif sehingga selalu timbul keinginan untuk kembali berkunjung ke Kota Yogyakarta.

Sedangkan Putu Parwata menyampaikan, maksud dan tujuan kunjungan kerja ini untuk berdiskusi yang berkenaan dengan perbaikan sistem dan pendapatan untuk Kabupaten Badung, di antaranya adalah bidang pemerintahan, pendanaan serta penataan lingkungan hidup.

Dari kunjungan kerja ini diharapkan rombongan dapat mempelajari langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal menata sistem pelayanan publik hingga menata sistem kebersihan kota.

Setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Pemerintah Kota Yogyakarta,

pihaknya berharap semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan pelajaran baru dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Badung.

Membacakan sambutan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, lebih lanjut Triwidiyanto mengungkapkan saat ini Pemkot Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Perda tersebut meliputi lima Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup yaitu Perencanaan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan hukum.

“Menata lingkungan hidup membutuhkan peran aktif masyarakat, untuk itulah Badan Lingkungan Hidup membentuk Fasilitator dan Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri yang beranggotakan masyarakat di level RW. Selain itu, juga telah terbentuk Bank Sampah yang saat ini berjumlah 405 Bank Sampah atau 65 persen dari 616 RW se-Kota Yogyakarta,” ungkapnya.

Untuk menjamin transparansi di bidang pelayanan perizinan, Pemkot Yogyakarta telah membentuk Dinas Perizinan, yang saat ini telah melayani 27 jenis izin seperti HO, IMB, serta izin penelitian. Di antaranya bisa diakses secara online. “Tahun ini Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO untuk yang ketujuh kalinya dari Badan Sertifikasi ISO Worldwide Quality Assurance (WQA),” kata dia. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005